



RINGKASAN KEBIJAKAN | JULI 2021

KTT Sistem Pangan PBB: Menghalangi Perubahan Sistem Pangan dari Penguasaan Korporasi¹

Terjemahan dari “The UN Food Systems Summit: Obstructing the Transformation of Corporate Food Systems” oleh FIAN International²

Ringkasan kebijakan ini ditujukan kepada pemerintah untuk membangkitkan kesadaran terhadap solusi yang salah dalam transformasi sistem pangan yang diajukan oleh KTT Sistem Pangan PBB (UNFSS) yang berlangsung pada September 2021.

Dokumen ini berisi permintaan khusus yang harus dibuat pemerintah selama KTT untuk mengurangi kemungkinan terburuk dan mendukung transformasi sistem pangan korporasi yang sejati demi tercapainya masyarakat dan planet yang sehat.

KONTEN

Dunia saat ini tengah mengalami berbagai krisis: Kelaparan yang terus meningkat sejak 2014 dan saat ini mempengaruhi hingga 811 juta orang³, konsumsi produk pangan ultra-proses yang telah memicu pandemi obesitas dan penyakit tidak menular lainnya, perubahan iklim yang berdampak buruk pada mata pencarian jutaan orang, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang semakin mengkhawatirkan. **Model produksi dan distribusi pangan saat ini sangat tidak berfungsi, dan konsekuensi dari model ini memerlukan biaya tinggi jika digunakan untuk sistem publik.**

Ketika kasus pertama COVID-19 menjadi berita utama satu setengah tahun yang lalu, sesuatu yang awalnya hanya merupakan krisis kesehatan masyarakat, dengan cepat berubah menjadi krisis mata pencarian dan pangan bagi banyak orang. Pemerintah di seluruh dunia mengadopsi langkah-langkah drastis yang sering diterapkan tanpa pandang bulu dan menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan – terutama pekerja harian dan pekerja lainnya yang bekerja di pasar informal. Dengan tidak adanya atau tidak memadainya jaringan perlindungan sosial, langkah-langkah ini telah nyaris membuat sebagian besar masyarakat tidak mampu bertahan hidup. Dalam krisis pangan ini, jumlah mereka yang menderita kelaparan telah meningkat secara drastis hingga 161 juta hanya dalam waktu setahun⁴.

¹ Dengan “sistem pangan korporasi” yang kami maksud adalah sistem pangan dominan yang dicirikan oleh model agroindustri dengan rantai nilai yang semakin mengglobal dan melayani kepentingan beberapa negara kuat dan perusahaan besar.

² Versi FIAN International yang berbahasa Inggris: https://www.fian.org/files/files/Policy_Brief-FINAL0.pdf

³ Angka dari FAO, IFAD, UNICEF, dan WFP pada tahun 2020 dan WHO pada tahun 2021. Keadaan Ketahanan Pangan dan Gizi di Dunia pada tahun 2021: Transformasi Sistem Pangan untuk Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi. Roma, FAO.

⁴ ibid

Berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia menyerukan keadilan yang lebih besar, dan jumlah demonstran terus bertambah. Pemerintah harus mendengarkan rakyat mereka dan memenuhi tuntutan terhadap hak mereka. **Dengan menganggap serius tuntutan rakyat dan menerapkan praktik nyata untuk mengatasi krisis, sumber daya pemerintah akan digunakan dengan cara yang jauh lebih berkelanjutan, sehat, dan adil.**

KKT Sistem Pangan PBB (UNFSS), yang dijadwalkan pada September 2021, dirancang untuk mengatasi masalah yang mengganggu sistem pangan saat ini. Namun demikian, KTT ini tidak ditujukan untuk mengatasi krisis pangan terkait COVID-19 atau penyebab struktural dari sistem pangan yang tidak berkelanjutan, tidak sehat, dan tidak adil. UNFSS bertujuan untuk menciptakan ilusi perubahan tanpa benar-benar mengubah apa pun, di mana status quo dari model produksi dan distribusi pangan yang dikendalikan oleh industri dan perusahaan akan tetap tidak terkendali.

MENGAPA KTT SISTEM PANGAN MENJADI PROBLEMATIK?

1. UNFSS MENGAJUKAN SOLUSI YANG SALAH DALAM TRANSFORMASI SISTEM PANGAN

KKT ini akan mengkonsolidasikan lebih lanjut mengenai pola investasi dalam sistem pangan industri, rantai nilai global, dan solusi berbasis pasar, termasuk sistem pelacakan cepat berbasis digital, pertanian dengan input kimia tinggi, dan solusi berbasis teknologi (palsu) untuk keberlanjutan sistem pangan. Apa yang disebut “solusi” ini mengesampingkan hak asasi manusia dan masyarakat dan membuka jalan bagi kooptasi dalam jalur transformasi yang nyata seperti agroekologi. Solusi ini padat modal dan tidak memperhatikan kebutuhan dan realitas yang terjadi di negara-negara Global Selatan. **Solusi yang didorong dalam KTT akan memperburuk ketergantungan pada rantai nilai global dan perusahaan transnasional. Solusi tersebut lebih lanjut mempromosikan “pertanian tanpa petani” yang merupakan kebalikan dari apa yang dibutuhkan negara-negara di Global Selatan, yaitu memulihkan otonomi mereka atas sistem pangan dan memastikan sistem pangan lokal yang lebih fungsional dan tangguh yang dapat tetap stabil di saat krisis.**

2. UNFSS GAGAL UNTUK MENGETENGAHKAN DIMENSI PUBLIK DALAM SISTEM PANGAN

KKT ini menganggap pangan adalah komoditas dan bukan sebagai milik bersama atau hak asasi manusia. Sayangnya, UNFSS memiliki bias korporasi yang kuat, yang jelas termanifestasi dalam kemitraan PBB dengan Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan pengumuman Pemimpin Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika (AGRA) sebagai Special Envoy (Utusan Khusus).⁵

Situasi ini selanjutnya dapat memungkinkan institusi publik dan organisasi komunal di bidang pangan dan pertanian, padahal krisis COVID telah menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem dan institusi publik. Selain itu, UNFSS gagal memberikan ruang bagi

⁵ Surat untuk UNSG pada bulan Maret 2020

negara-negara untuk membahas bagaimana mereka dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban hak asasi manusia, lingkungan, dan tenaga kerja mereka dalam hal regulasi perdagangan, investasi, dan korporasi yang memadai untuk kepentingan publik. **Menaruh pangan dalam pusaran pasar hanya akan melanggengkan dan mendorong ketidakadilan dan permasalahan kesehatan yang sudah eksis saat ini, di mana akses dan kualitas pangan bergantung pada daya beli dan produksi pangan skala kecil berada dalam bahaya kepunahan.**

3. UNFSS TIDAK BERLANDASKAN HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK ATAS PEMBANGUNAN DAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI

UNFSS menciptakan ilusi inklusivitas, namun masih belum jelas bagaimana dan oleh siapa keputusan dibuat. Penyelenggara UNFSS telah dengan sengaja mengesampingkan mekanisme partisipasi yang ada serta gagal menghormati otonomi dan hak menentukan nasib sendiri yang dimiliki masyarakat sipil dan Masyarakat Adat. UNFSS memilih sendiri peserta dari kalangan masyarakat sipil tanpa kriteria yang jelas dan transparan.⁶

Proses persiapan KTT ini memang tidak menempatkan orang-orang yang paling terkena dampak kelaparan, kekurangan gizi, dan kerusakan ekologis sebagai pusatnya. KTT ini juga tidak memprioritaskan hak atas pembangunan dan hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya bagi Negara-negara Tertinggal. **Sebaliknya, segelintir pemerintah dari Utara, asosiasi bisnis yang mewakili kepentingan perusahaan transnasional, filantropi, dan**



Sumber: Mufid Majnun, *Unsplash*

⁶ Untuk analisis yang lebih mendalam tentang masalah KTT, silakan lihat makalah analisis CSM “[What is wrong with the UNFSS](#)”.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang mempromosikan kepentingan perusahaan mendominasi jalannya KTT.

4. UNFSS MEMPERTIMBANGKAN TATA KELOLA MULTISTAKEHOLDER ATAU MULTIPIHAK SEBAGAI JALAN KE DEPAN

KTT tersebut bukan merupakan perpanjangan dari keputusan negara-negara anggota seperti KTT Pangan Dunia sebelumnya. Meskipun nama “KTT” biasanya ditujukan untuk pertemuan antar pemerintah, pada kenyataannya, hanya segelintir pemerintah nasional yang menjadi bagian dari Komite Penasihatnya. Sebaliknya, UNFSS mengikuti pendekatan multi pemangku kepentingan atau multipihak (multi-stakeholder) yang kuat, yang menempatkan pemerintah, perusahaan, aktor sektor swasta lainnya, filantropi, ilmuwan, dan LSM internasional pada pijakan yang sama.⁷

Kegagalan untuk mengenali determinan struktural penyebab krisis saat ini mengakibatkan ketidakmampuan mereformasi penatakelolaan (governance). Padahal reformasi tata kelola diperlukan untuk memastikan akuntabilitas yang demokratis (termasuk tanggung jawab korporasi) dan menjaga ruang pembuatan kebijakan publik dari pengaruh korporasi yang tidak semestinya. Penting juga untuk dicatat bahwa KTT sangat mengedepankan kesukarelaan dan koalisi aksi multipemangku kepentingan. Sikap ini melegitimasi sektor korporasi sebagai bagian dari solusi, padahal sebenarnya bertanggung jawab atas banyak masalah. Sementara itu, sikap ini juga menghalangi adopsi peraturan yang mengikat untuk perusahaan transnasional dan meningkatkan akuntabilitas untuk negara-negara kuat. **Bentuk pemerintahan multipemangku kepentingan yang meminggirkan Negara-negara Tertinggal dalam pengambilan keputusan internasional sungguh sangat memprihatinkan.**



MENGAPA YANG MENJADI FOKUS UTAMA ADALAH “SISTEM PANGAN”? APA YANG TERJADI DENGAN KETAHANAN PANGAN DAN HAK ATAS KETERSEDIAAN PANGAN? DI MANAKAH POSISI KEDAULATAN PANGAN?

Konsep sistem pangan telah hadir di setiap wacana tentang ketahanan pangan dan gizi dan UNFSS semakin memperkuat penggunaannya. Akan tetapi, penggunaannya yang luas terkenal

⁷ Untuk informasi lebih lanjut tentang mengapa kami menganggap inisiatif multistakeholder berbahaya, lihat [“Briefing note on Multistakeholder Initiatives”](#).

karena ketidakjelasan akan makna yang tepat.⁸ Sementara itu, kita menerima begitu saja bahwa kita semua mengacu pada hal yang sama. Pertama, kerangka sistem pangan sebenarnya dapat mewakili pergeseran paradigma yang bergerak melampaui produktivitas pertanian dan solusi berbasis pasar menuju kebijakan dan praktik holistik yang merebut kembali sistem pangan sebagai barang publik. **Namun, pendekatan arus utama terhadap sistem pangan, yang merupakan inti dari KTT, didasarkan pada kepentingan sistem pangan korporasi.**

Menghadapi kebingungan terminologi ini, penting untuk memperjelas bahwa definisi sistem pangan, yang pertama dan terutama, adalah deskriptif. Secara garis besar, definisi tersebut harus menggambarkan bagaimana makanan diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, dan dibuang di suatu wilayah tertentu, serta dampak dan pendorong kegiatan tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak termasuk arah untuk merubah sistem pangan. Itu tidak normatif.

Ketahanan pangan adalah konsep inti yang telah dikesampingkan oleh wacana sistem pangan. Ketahanan pangan itu normatif, tapi tidak harus mencakup instrumen akuntabilitas dan keberlakuan.

Instrumen yang paling jelas adalah hak asasi manusia atas ketersediaan pangan dan gizi yang cukup (RTFN), yang melibatkan kewajiban negara dan menyediakan kerangka preskriptif untuk transformasi sistem pangan.⁹

Konsep kedaulatan pangan juga menjadi kunci ketika berbicara tentang arah preskriptif untuk transformasi sistem pangan. Ini menekankan kontrol demokratis atas sistem pangan dan mengatasi akar penyebab kelaparan dan kekurangan gizi, serta menempatkan masalah kekuasaan di garis depan.

PERMINTAAN KEPADA PEMERINTAH: BAGAIMANA MENGEDEPANKAN PEMAHAMAN HOLISTIK MENGENAI SISTEM PANGAN YANG BERDASARKAN HAK ATAS KETERSEDIAAN PANGAN DAN GIZI YANG CUKUP DAN KEDAULATAN PANGAN UNTUK MEMBUAT TRANSFORMASI YANG NYATA TERJADI?

1. MENDORONG TRANSFORMASI YANG NYATA: MEMPERKUAT SISTEM PANGAN LOKAL YANG TANGGUH DAN BERBASIS AGROEKOLOGI

Sistem pangan lokal yang berdasarkan pengakuan atas kontribusi positif dari produsen pangan skala kecil dan yang mengakui bahwa pekerja pangan dan pertanian adalah orang-orang yang melestarikan dan meregenerasi lingkungan serta melindungi dan meningkatkan

⁸ Satu-satunya tempat di mana paradigma sistem pangan dibahas secara internasional adalah dalam *Voluntary Guidelines on food systems and nutrition (VGFSyN)* yang diadopsi pada Februari 2021 oleh CFS. Namun, VGFSyN sebagai dokumen negosiasi pertama yang mampu memandu transformasi sistem pangan jauh dari harapan dan oleh karena itu tidak didukung oleh CSM. Negosiasi dalam VGFSyN telah dengan jelas menunjukkan bahwa negara-negara anggota yang paling kuat tidak ingin membiarkan paradigma sistem pangan mengungkap potensi penuhnya.

⁹ Komunitas internasional negara-negara secara resmi mengakui RTFN dalam pasal 25(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, dan kemudian dalam Kovenan Internasional tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 11) sebagai bagian dari hak untuk standar hidup yang memadai. Isi yang tepat dan jelas dari hak ini serta kewajiban negara yang berhubungan selanjutnya dijabarkan dalam Komentar Umum No. 12 Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) (1999), dan kemudian dengan lebih rinci di FAO dalam Pedoman Hak Atas Pangan tahun 2004.

keanekaragaman hayati dapat memperkuat produksi pangan petani kecil yang berkelanjutan, melestarikan pengetahuan tradisional, dan memungkinkan dialog (atau kreasi bersama) pengetahuan.

Dukungan terhadap agroekologi, yang dipahami sebagai praktik, pengetahuan, dan gerakan, adalah sesuatu yang mendasar karena hal ini memainkan peran utama dalam memastikan ketahanan sistem pangan lokal dan mempromosikan kedaulatan pangan. Pada saat yang sama, perdagangan, input pertanian, dan pasar yang relevan perlu diatur untuk memastikan bahwa mereka tidak merusak kapasitas dan keberhasilan penyedia pangan lokal serta sistem pangan lokal secara lebih luas.

2. DAHULUKAN KEPENTINGAN UMUM! MENGAKUI SISTEM PANGAN SEBAGAI KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN MAKANAN SEBAGAI KEBUTUHAN BERSAMA

Pendekatan sistem pangan holistik mengakui dinamika kompleks yang saling terkait antara sistem pangan dengan sektor lain (kesehatan, pertanian, lingkungan, politik, dan budaya) dan sistem lain (seperti ekosistem, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem energi, dan sistem kesehatan). Dengan demikian, sistem pangan itu menggabungkan dan dapat melayani berbagai tujuan publik seperti perlindungan dan regenerasi alam, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan mata pencaharian, budaya dan pengetahuan, dan hubungan sosial.

Dalam hal ini, sistem pangan menawarkan titik masuk penting bagi kebijakan dan investasi publik, di mana kepentingan publik harus dilindungi dari kepentingan privat. Ini juga berarti bahwa transformasi sistem pangan membutuhkan koordinasi antara domain-domain kebijakan yang berbeda dan harus mengatasi masalah-masalah struktural seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan pemerintahan yang tidak demokratis. Pangan harus dianggap sebagai sumber daya penting yang memerlukan pengelolaan sebagai mandat sosial untuk menjamin hak atas ketersediaan pangan yang cukup untuk semua – sebagai kebutuhan bersama. Oleh karena itu, institusi publik dan organisasi komunal harus diperkuat, kekuatan korporasi dibongkar, dan korporasi dan modal keuangan harus diatur.

3. MENEMPATKAN PEMAHAMAN HOLISTIK TENTANG HAK ATAS KETERSEDIAAN PANGAN DAN GIZI YANG CUKUP (RTFN) PADA INTI PENDEKATAN SISTEM MAKANAN YANG TRANSFORMATIF DAN NYATA

Pemahaman holistik tentang RTFN melampaui perspektif ketahanan pangan dan memerlukan elemen-elemen kunci berikut ini:

- Hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai prinsip panduan
- Perhatian khusus pada hak-hak perempuan dan kesetaraan gender
- Kedaulatan pangan sebagai inti transformasi, yang menegaskan hak-hak masyarakat, bangsa, dan negara untuk secara demokratis menentukan sistem pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan mereka sendiri dan untuk mengembangkan kebijakan yang memandu bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

- Pendekatan holistik terhadap nutrisi yang lebih dari sekadar konsumsi makanan, pemahaman mengenai kesejahteraan dalam hal nutrisi yang terkait dengan dimensi sosial dari praktik makan serta kesehatan tanah dan planet secara keseluruhan
- Pengakuan dan implementasi kewajiban negara ekstrateritorial, khususnya kewajiban dalam mengatur korporasi domestik untuk mematuhi hak asasi manusia di luar negeri dan kerja sama antar pemerintah untuk memastikan hak asasi manusia dijamin.

4. HENTIKAN PRAKTIK MULTIPLEMANGKU KEPENTINGAN! MENGKLARIFIKASI PERAN DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN YANG KUAT TERHADAP KONFLIK KEPENTINGAN

Badan-badan PBB harus mendapatkan pendanaan yang memadai agar dapat berfungsi secara mandiri. Mereka harus didemokratisasi untuk memastikan partisipasi yang berarti dari para pemegang hak. Pendekatan hak asasi manusia juga memerlukan klarifikasi peran dalam sistem pangan: negara perlu mengadopsi kerangka kebijakan yang secara jelas membedakan dan memastikan peran yang tepat untuk berbagai aktor dalam pembuatan kebijakan publik dan pelaksanaan program (pemegang hak dan pengembang tugas). Pendekatan ini juga digunakan untuk memastikan partisipasi yang berarti dari mereka yang paling terkena dampak kelaparan dan kekurangan gizi dalam pengambilan keputusan publik dan pelaksanaan program.

Mereka juga perlu mengadopsi perlindungan yang kuat untuk melindungi dari konflik kepentingan dari relasi yang tidak sepasinya dengan sektor korporasi dan dari pengaruh sektor tersebut. Negara harus memastikan transparansi dalam tindakannya dan menempatkan kerangka kerja dan mekanisme yang jelas di mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya atas keputusan dan tindakan yang diambil terkait dengan sistem pangan. Pada saat yang sama, negara harus menetapkan peraturan yang jelas dan kerangka akuntabilitas untuk menahan aktor swasta, termasuk korporasi, dan bertanggung jawab atas tindakan yang merusak hak asasi manusia.



**PENULIS:**

Charlotte Dreger, Sofia Monsalve / FIAN Internasional

Tata Letak:

FIAN Internasional / Harjyot Khalsa

Sambutan:

Pengetahuan dalam naskah kebijakan ini didasarkan pada pekerjaan kolektif yang dilakukan FIAN dalam Tanggapan Rakyat Otonom (*Autonomous People*) terhadap KTT Sistem Pangan PBB.

Diterbitkan oleh:

FIAN International, Juli 2021

Link asli: https://www.fian.org/files/files/Policy_Brief-FINAL0.pdf

Diterjemahkan kembali oleh:

FIAN Indonesia, Juli 2021

Seluruh publikasi ini atau sebagiannya dapat digunakan oleh pihak lain secara bebas selama mereka menuliskan referensi yang tepat mengenai publikasi aslinya.

Untuk mengetahui lebih lanjut

<https://www.csm4cfs.org/14024/>

<http://www.foodsystems4people.org/>

Untuk informasi lebih lanjut,

Follow FIAN di Media Sosial

www.fian.org | Twitter: @FIANista | Instagram: @fianinternational | FIAN Internasional

www.fian-indonesia.org | Twitter: @IndonesiaFian | Instagram: @fianindonesia